

https://farid.ps/articles/iran_withdrawal_from_non_proliferation_treaty/id.html

Republik Islam Iran: Pemberitahuan Niat untuk Menarik Diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang,

Republik Islam Iran, dengan menjalankan hak kedaulatannya berdasarkan Pasal X, ayat 1, dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), dengan ini memberitahukan kepada semua Pihak dalam Perjanjian dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang niatnya untuk menarik diri dari NPT, berlaku tiga bulan sejak tanggal ini, karena peristiwa luar biasa yang terkait dengan subjek Perjanjian yang telah sangat merusak keamanan nasional dan hak kedaulatannya. Keputusan ini, yang diambil dengan penyesalan mendalam, merupakan tanggapan langsung terhadap agresi tanpa provokasi dari Israel dan Amerika Serikat, yang tindakannya, bertentangan dengan hukum internasional, telah membuat Iran tidak punya pilihan lain selain mempertimbangkan penarikan diri untuk melindungi rakyat dan kedaulatannya. Iran memohon kepada komunitas internasional untuk mendukung pemulihan keadilan dan menegakkan prinsip-prinsip NPT.

Komitmen Iran terhadap Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Stabilitas Global

Iran, sebuah negara yang tidak memulai agresi militer terhadap negara mana pun selama lebih dari dua abad, menandatangi NPT pada tahun 1968 dan meratifikasinya pada tahun 1970 dengan komitmen teguh terhadap penggunaan damai teknologi nuklir, sebagaimana diatur dalam Pasal IV, yang menegaskan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Komitmen ini diperkuat lebih lanjut oleh fatwa agama yang dikeluarkan oleh Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, yang menyatakan senjata nuklir tidak sesuai dengan ajaran Islam, mencerminkan dedikasi moral dan hukum Iran terhadap non-proliferasi. Iran secara konsisten bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), menundukkan program nuklirnya pada inspeksi ketat untuk memverifikasi sifat damainya, meskipun terjadi perselisihan sesekali yang didorong oleh tekanan politik eksternal. Sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Iran telah memenuhi kewajiban NPT-nya dengan itikad baik, hanya berusaha menjalankan hak-haknya sambil berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global.

Peristiwa Luar Biasa yang Merusak Keamanan dan Hak-Hak Iran

Peristiwa luar biasa berikut, yang secara langsung terkait dengan subjek NPT, telah secara kritis merusak keamanan nasional dan hak kedaulatan Iran:

- 1. Agresi Ilegal Israel dan Ketidakpatuhan terhadap Norma Internasional:** Israel, yang bukan penandatangan NPT dan memiliki arsenal nuklir yang tidak diumumkan, melancarkan serangan tanpa provokasi terhadap fasilitas nuklir terlindungi Iran di Fordow, Natanz, dan Esfahan pada tanggal 13 Juni 2025, seperti yang dikonfirmasi oleh penilaian IAEA. Penolakan Israel untuk bergabung dengan NPT, tunduk pada inspeksi IAEA, atau mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti Resolusi 242 (1967) tentang wilayah Palestina yang diduduki, dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024 yang mengamanatkan akses bantuan kemanusiaan dan penghentian pemukiman ilegal, mencerminkan pola pengabaian terhadap hukum internasional. Tindakan ini, ditambah dengan pelanggaran berkelanjutan terhadap rakyat Palestina, mengancam stabilitas regional dan secara langsung membahayakan keamanan Iran sebagai negara yang mematuhi NPT.
- 2. Pelanggaran Hukum Internasional oleh Amerika Serikat:** Pada tanggal 22 Juni 2025, Amerika Serikat, sebuah negara bersenjata nuklir berdasarkan NPT, melakukan serangan tanpa provokasi terhadap fasilitas nuklir Iran yang sama, melanggar hak-hak Iran berdasarkan Pasal IV NPT dan Pasal 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekerasan. Dukungan militer terus-menerus Amerika Serikat kepada Israel, meskipun ketidakpatuhan Israel terhadap kewajiban internasional, mempertahankan standar ganda dalam kerangka NPT, yang merusak keamanan Iran dan kredibilitas Perjanjian.

Tindakan agresi dari dua negara yang beroperasi di luar batas hukum internasional ini membuat Iran terpapar ancaman yang tidak adil, menargetkan program nuklir damainya dan melanggar kedaulatannya. Iran, sebuah negara yang berkomitmen pada perdamaian, kini menghadapi tantangan eksistensial karena kegagalan komunitas internasional untuk menahan tindakan-tindakan nakal ini.

Syarat untuk Mempertimbangkan Kembali Penarikan Diri dan Seruan untuk Dukungan

Dalam semangat niat baik dan dedikasi terhadap perdamaian global, Iran mengkondisikan penarikannya pada tanggapan komunitas internasional terhadap permintaan berikut, yang bertujuan untuk memulihkan keadilan dan memastikan stabilitas regional dalam periode pemberitahuan tiga bulan:

- 1. Pakta Non-Agresi:** Israel dan Amerika Serikat harus berkomitmen pada pakta non-agresi yang mengikat secara hukum dengan Iran, menjamin tidak ada tindakan militer lebih lanjut terhadap wilayah, penduduk, atau infrastrukturnya, sesuai dengan Pasal 2(4) Piagam PBB.
- 2. Keanggotaan Israel dalam NPT dan Pengawasan IAEA:** Israel harus menandatangi dan meratifikasi NPT sebagai negara tanpa senjata nuklir dan

menundukkan fasilitas nuklirnya pada pengamanan komprehensif IAEA, mempromosikan transparansi dan kesetaraan dalam rezim non-proliferasi.

3. **Kepatuhan Israel terhadap Kewajiban PBB dan ICJ:** Israel harus mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang relevan, serta putusan ICJ tahun 2024, dengan memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, menghentikan aktivitas pemukiman ilegal, dan menegakkan hak serta kesejahteraan rakyat Palestina.
4. **Akuntabilitas melalui Keanggotaan ICC:** Israel dan Amerika Serikat harus menandatangi dan meratifikasi Statuta Roma, bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, termasuk yang memengaruhi Iran dan rakyat Palestina.
5. **Penyesuaian Amerika Serikat dengan Hukum Internasional:** Amerika Serikat harus memberlakukan kebijakan yang melarang bantuan militer kepada negara-negara yang melanggar resolusi PBB dan putusan ICJ, sehingga mendukung tatanan internasional berbasis aturan dan menghentikan tindakan yang mengacaukannya.

Jika kemajuan signifikan tercapai terhadap permintaan ini dalam periode yang ditentukan, Iran siap untuk mempertimbangkan kembali penarikannya, mencerminkan komitmen mendalamnya terhadap dialog konstruktif dan tatanan internasional yang adil. Tanpa kemajuan tersebut, Iran mungkin tidak memiliki alternatif lain selain menjalankan hak kedaulatannya untuk menarik diri dari NPT untuk melindungi keamanan dan hak-haknya dari agresi yang terus berlanjut.

Seruan kepada Komunitas Internasional

Iran dengan tulus meminta semua Pihak NPT, Perserikatan Bangsa-Bangsa, IAEA, dan komunitas internasional yang lebih luas untuk mengutuk serangan ilegal oleh Israel dan Amerika Serikat, menangani ketidakseimbangan dalam rezim non-proliferasi, dan mendukung upaya Iran untuk mencapai keadilan. Kegagalan untuk melawan tindakan nakal tersebut berisiko merusak integritas NPT dan mengikis perdamaian serta keamanan global. Iran, sebagai negara damai yang diserang, mencari solidaritas dari negara-negara yang berkomitmen pada kedaulatan, kesetaraan, dan supremasi hukum.

Iran tetap sepenuhnya terbuka terhadap upaya diplomatik, termasuk melalui mediasi yang sedang berlangsung oleh pihak-pihak yang tidak memihak, untuk menyelesaikan keluhan ini dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Pemberitahuan ini adalah permohonan untuk keadilan dan akuntabilitas, mencerminkan tekad Iran untuk melindungi rakyatnya dan menegakkan hak-haknya berdasarkan hukum internasional.

Pemerintah Republik Islam Iran

Penafian

Dokumen ini adalah skenario hipotetis dan strategi diplomatik yang diusulkan untuk Republik Islam Iran untuk mengatasi krisis geopolitik setelah serangan tanpa provokasi terhadap fasilitas nuklirnya oleh Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Ini bukan

pernyataan resmi atau kebijakan Iran, melainkan latihan analitis untuk menunjukkan bagaimana Iran, sebuah negara yang tidak memulai agresi militer selama lebih dari 200 tahun, dapat memanfaatkan Pasal X NPT untuk mencari keadilan dan dukungan internasional melawan tindakan negara nakal. Berbeda dengan intervensi militer berulang oleh Israel dan Amerika Serikat, catatan damai Iran menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan, stabilitas regional, dan tatanan global berbasis aturan. Usulan ini bertujuan untuk mempromosikan dialog dan de-eskalasi melalui kepatuhan terhadap hukum internasional.